

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Demokrasi

1) Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang digunakan di Athena Kuno pada Abad ke-5 SM, yakni *Demos* yang berarti rakyat dan *Kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literatur bermakna pemerintahan rakyat. Adapun secara harfiah makna demokrasi adalah pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat harus ditaati (Anggara, 2013:273).

Menurut David Baetham dan Kevin Boyle dalam Muthi (2013: 98) mengemukakan bahwa “Demokrasi adalah bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif”. Terdapat dua hal esensial dalam konsep demokrasi yang mereka kemukakan. Pertama, demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota memiliki hak yang sama. Kedua, demokrasi merupakan indikator dapat diwujudkannya prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis serta melibatkan partisipasi rakyat dalam mewujudkan pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.

Menurut Joseph A. Schmitter, “Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Adapun menurut Sidney Hook, “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara”. Demokrasi diyakini menjadi sebuah mekanisme politik yang dapat melindungi kebebasan rakyat dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk melindungi rakyat dalam menikmati kebebasannya (Rauf, 1997: 6).

2) Macam-macam Demokrasi

Demokrasi sendiri tentunya memiliki beberapa macam berdasarkan dengan kategorinya masing-masing. Menurut Syamsu Ridwan (2019 : 4) macam-macam demokrasi sendiri dibagi ke dalam beberapa kategori diantaranya adalah :

1) Demokrasi berdasarkan Prinsip Ideologi

- a) Demokrasi Liberal, demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Dimana setiap individu dapat mendominasi dalam demokrasi, pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat, karena pemerintah memiliki kekuasaan terbatas.

Demokrasi Liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusi yang dibatasi oleh konstitusi.

b) Demokrasi Komunis, demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, dimana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi di pegang oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi komunis tidak dibatasi dan bersifat totaliter yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah.

c) Demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideology Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi hanya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Demokrasi berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

a) Demokrasi Langsung (*Dirrect Democracy*) merupakan demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk mengambil keputusan terhadap suatu negara. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya.

b) Demokrasi Tidak Langsung (*Indirrect Democracy*) merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah

dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dan menjadi representasi dari seluruh rakyat yang diwakilinya.

3) Demokrasi berdasarkan Fokus Perhatiannya

- a) Demokrasi Formal, merupakan demokrasi yang berfokus pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
- b) Demokrasi Material, merupakan demokrasi yang berfokus dalam bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
- c) Demokrasi Gabungan, merupakan demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi.

2.1.2 Partisipasi Politik

1) Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Slameto, “Partisipasi Politik adalah Pemusatan energi psikis yang tertuju pada suatu objek, dan meliputi banyak sedikitnya kesadaran yang meliputi banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan”. Sedangkan Menurut I Nyoman Sumardi, “Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan

pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal dan/atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan” (Anggara, 2013:141).

Menurut Herbert Mc Closky dalam Budiardjo (2008:367) menyatakan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentuka kebijakan umum (*The term political preparation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the informan of public policy*).

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Budiardjo (2008:368) menyatakan bahwa “ Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang di maksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (*By political participation we mean activity by private citizen designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).

2) Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik ini memiliki berbagai macam bentuk, diaman bentuk partisipasi politik merupakan bentuk atau langkah nyata tindakan atau kegiatan dari Partisipasi Politik. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994:9-10) bentuk partisipasi politik terbagi menjadi beberapa macam klasifikasikan, sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pemilihan (*Electoral Activity*) adalah bentuk partisipasi politik secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan. Misalnya pemberian suara, ikut menjadi tim sukses suatu calon, memberikan dana kampanye untuk calon, ikut menjadi panitia pemilihan.
- 2) *Lobbying*, adalah bentuk partisipasi politik masyarakat sebagai individu atau kelompok untuk menghubungi pimpinan politik atau pejabat Negara, tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan politik pemerintahan terkait permasalahan tertentu yang berdampak ke masyarakat.
- 3) Kegiatan Organisasi atau *Organization Activity*, adalah bentuk partisipasi politik masyarakat dengan ikut terlibat dalam organisasi social ataupun politik, misalnya LSM, Ormas, Kelompok Kepentingan, Pers, dan lain lain.
- 4) *Contacting*, adalah bentuk partisipasi politik masyarakat sebagai individu atau kelompok untuk menghubungi pimpinan politik atau pejabat Negara, tokoh politik dalam upaya membangun jaringan kerjasama untuk mempengaruhi keputusan politik pemerintah.

- 5) Tindakan Kekerasan atau *Violence*, adalah bentuk partisipasi politik masyarakat dengan cara tindakan kekerasan untuk mempengaruhi keputusan politik pemerintahan. Tindakan kekerasan terbangun atas motivasi-motivasi partisipasi yang sangat kuat. Misalnya pembangkangan sipil, huru hara, revolusi dan pemberontakan terhadap negara.

Sedangkan jika menurut Milbrath dan Goel (dalam Anggara, 2013:152) membagi partisipasi politik dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

- 1) Kelompok Apatitis, adalah kelompok yang tidak mempunyai ketertarikan terhadap politik dan cenderung menarik diri dari proses politik.
- 2) Spektor, adalah kelompok yang partisipasi politiknya sebatas memilih pada pemilihan umum.
- 3) Gladiator, kelompok ini adalah kelompok komunikator, spesialis mengadakan kontak langsung dengan pejabat pemerintah, aktivis partai, dan aktivis masyarakat.
- 4) Pengkritik.

Menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- 1) Partisipasi langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan

pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

- 2) Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik

Dalam jalannya suatu partisipasi politik dari masyarakat sendiri tentunya memiliki banyak sekali factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu fenomena partisipasi politik. Menurut Sahya Anggara (2013:145) menjelaskan bahwa pada realitas yang bersifat empiris, bentuk dari partisipasi politik sangat dipengaruhi beberapa factor seperti latar belakang sejarah, kemajuan negara, tingkat pendidikan masyarakat dan kualitas kesadaran bernegara.

Sedangkan menurut Myron Weiner dalam Anggara (2013:146) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat lima faktor timbulnya partisipasi yang luas dalam proses politik, sebagai berikut :

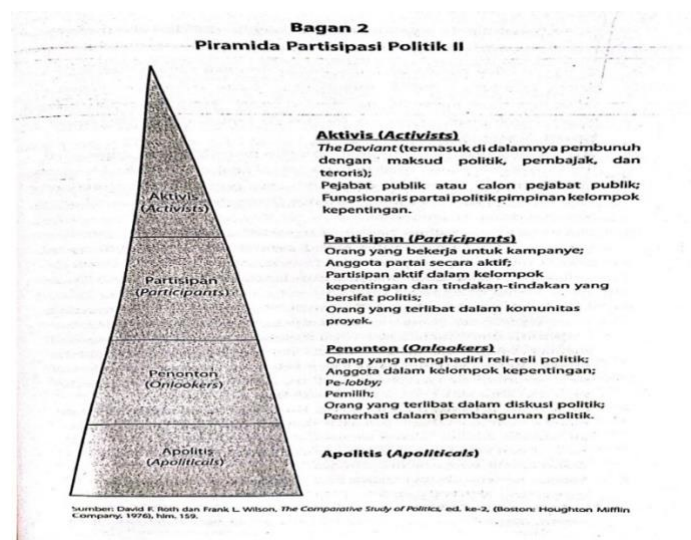
- a) Modernisasi, proses modernisasi telah membuat kehidupan masyarakat berubah kearah berkemajuan dalam segala bidang kehidupan, berubah tersebut menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut untuk ikut serta dalam kekuasaan politik.
- b) Perubahan-perubahan struktur kelas social.
- c) Pengaruh intelektual dan komunikasi massa modern.
- d) Konflik antar kelompok pimpinan politik.

e) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial.

2.1.3 Teori Piramida Partisipasi Politik David Roth dan Frank L. Wilson

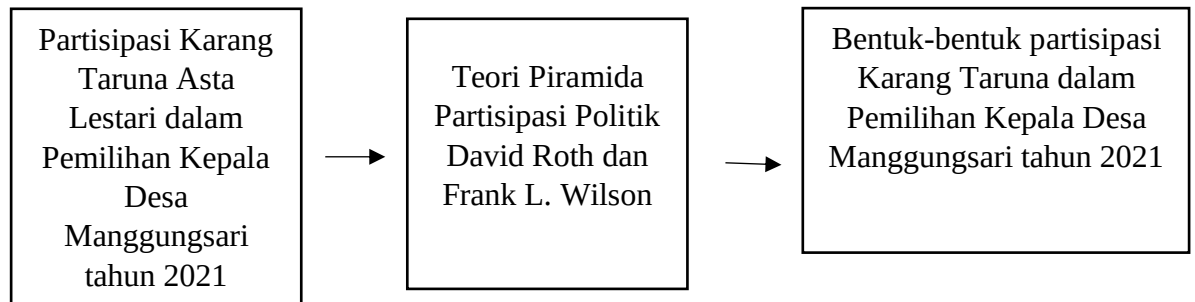
Piramida pola partisipasi politik yang di sampaikan oleh David Roth dan Frank L. Wilson dalam Sugiyono (2020 : 372) melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori : a. Aktivis (*Activists*), b. Partisipan (*Participants*), c. Penonton (*Onlookers*), dan d. Apolitik (*Apoliticals*). Piramida menurut Roth dan Wilson menarik untuk disimak karena memasukan perilaku menyimpang (*the deviant*) seperti pembunuhan politik, pembajakan, dan terorisme; dibagian puncak piramida.

Gambar 2. 1 Teori Piramida Partisipasi Politik



2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 2Kerangka Pemikiran



Penjelasan :

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu dari macam Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah yang pelaksanaannya di Desa dan di pilih oleh seluruh masyarakat Desa. Pilkades sendiri tentunya dilaksanakan di Desa terkait yaitu di Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Pemilihan Kepala Desa di Desa Manggungsari diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dimana masyarakat ini meliputi berbagai golongan dari golongan muda yang berisi pemuda dan pemudi, tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan masyarakat Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya yang memang sudah memiliki hak pilih yang dianggap sudah memenuhi persyaratan menjadi Pemilih. Dalam hal ini penyusun akan meneliti mengenai Partisipasi Politik Karang Taruna Asta Lestari dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 di Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam sebuah Pemilihan Kepala Desa ini tentunya banyak sekali partisipasi dari masyarakat dari berbagai golongan yang memiliki perannya tersendiri. Salah

satunya adalah peran dari Karang Taruna Asta Lestari dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut yang tentunya memiliki peran yang penting sebagai kaum muda di Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Kesadaran yang dilakukan oleh Karang Taruna ini dalam pemilihan tentunya memiliki peran guna mencapai keberhasilan dalam proses keberlangsungannya daripada Pemilihan Kepala Desa di Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Pemuda Karang Taruna ASTA LESTARI ini tentunya memiliki semangat yang tinggi guna tercapainya keberhasilan dari Pemilihan Kepala Desa ini untuk bisa memajukan Desa Manggungsari yang mereka banggakan. Peran yang dilakukan oleh Karang Taruna Asta Lestari sendiri tentunya mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan baik itu masyarakat dan tokoh masyarakat maupun dari Pemerintah Desa di Desa Manggungsari. Karena dengan adanya peran dari Karang Taruna ASTA LESTARI sebagai kaum muda ini mampu lebih memudahkan atau membantu untuk masyarakat yang memang belum tau atau masyarakat yang usia nya sudah lanjut dimana mereka harus di bantu dan diberikan penjelasan yang lebih jelas supaya lebih bisa memahaminya sehingga dalam tercapainya keberhasilan daripada Pemilihan Kepala Desa di Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dianggap bisa lebih maksimal dan meraih hasil yang memuaskan. Disamping semua itu tentunya namanya kehidupan tidak terlepas dari adanya Pro dan Kontra yang nantinya berguna untuk menyeimbangkan jalannya Pemilihan Kepala Desa di Desa Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021.